

	Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
--	--

1. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan IV 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD	Persentase	100%	100%	100%	100%
II	Sasaran Program 2. Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi					
2.1	Indikator 2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun (Rupiah)	Rp 1.905,60 Triliun	Rp1.905,6T riliun	Rp1.931,2 Triliun	101,32%
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi					
3.1	Indikator 3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Investasi	Persentase	82%	82%	94,32%	105,02%
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100%

V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100%
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi					
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	Persentase	85%	85%	100%	100%
6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi					

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1: Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD, di mana proses akses OECD Indonesia dilakukan dalam rangka mempercepat transformasi Indonesia yang terdiri atas transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola melalui keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. Dalam kerangka tahapan akses yang ditetapkan oleh OECD, penyusunan dan penyampaian dokumen *Initial Memorandum* merupakan bagian krusial dari proses awal akses setelah penyusunan peta jalan (*roadmap*).

Proses ini meliputi pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap kesesuaian kebijakan dan praktek Indonesia dengan standar dan instrumen OECD, serta penyusunan dokumen *Initial Memorandum* yang mencerminkan komitmen dan kesiapan Indonesia dalam proses menjadi anggota OECD. Pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri dan penyampaian dokumen tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan Indonesia dalam proses akses dan menunjukkan keseriusan serta kesiapan teknis dalam menjawab ekspektasi Komite OECD dalam tahap evaluasi teknis berikutnya.

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen *Initial Memorandum* kepada Sekretariat OECD.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD

Latar Belakang

Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan koordinasi yang dilakukan oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretariat Tim Nasional OECD dalam mengawal proses awal akses Indonesia keanggotaan OECD. Indikator ini mencerminkan capaian pelaksanaan penilaian mandiri oleh kementerian/lembaga nasional terkait, penyusunan dokumen Initial Memorandum, serta penyampaian kepada Sekretariat OECD sebagai bentuk pemenuhan kewajiban substansial dalam tahapan akses.

Initial Memorandum merupakan penilaian mandiri awal yang disusun oleh Pemerintah Indonesia untuk menilai tingkat keselarasan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan praktik nasional dengan seluruh instrumen hukum OECD yang berlaku dan mengikat bagi negara-negara anggota. Instrumen hukum tersebut mencakup Keputusan, Rekomendasi, dan Pernyataan Substantif, serta Perjanjian atau Kesepakatan internasional yang dikembangkan dalam kerangka kerja OECD. Penilaian mandiri ini harus mencakup instrumen hukum yang telah diterapkan oleh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan proses akses, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD, yang menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Pelaksana. Selanjutnya, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024 menetapkan struktur pelaksana Tim Nasional OECD, termasuk pembagian ke dalam 26 bidang sesuai dengan Peta Jalan Akses Indonesia. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral bertindak sebagai Sekretariat Tim Nasional OECD, dengan tanggung jawab utama mengoordinasikan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan penilaian mandiri terhadap instrumen hukum OECD dan penyusunan dokumen Initial Memorandum.

Berdasarkan Peta Jalan Akses dan daftar instrumen hukum yang diterbitkan oleh Sekretariat OECD, terdapat 240 instrumen hukum yang harus dianalisis kesesuaiannya dengan kebijakan dan regulasi nasional. Proses ini mencakup pelaksanaan penilaian mandiri oleh masing-masing kementerian/lembaga, pengumpulan dan konsolidasi hasil asesmen, penyusunan dokumen Initial Memorandum, hingga pengorganisasian penyampaian kepada Sekretariat OECD.

Formula pengukuran:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah IM yang disampaikan ke Sekretariat OECD}}{\text{Total IM}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun target triwulan sebesar 50% ditentukan berdasarkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk dapat menyampaikan Dokumen Initial Memorandum secara lengkap kepada Sekretariat OECD pada Triwulan IV tahun 2025.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD yang mencapai target yang telah mencapai 10% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD	Persen	100%	100%	100 % (Memuaskan)

Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD merupakan *direct cascading* dari indikator Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD. IKU ini ditargetkan sebesar 100% dan sampai dengan laporan ini disusun, persentase penampaian Dokumen IM kepada Sekretariat OECD telah mencapai 100%.

Tindak Lanjut Proses Akses OECD Pasca Penyampaian Dokumen Initial Memorandum dan Persiapan Technical Review

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung persiapan Indonesia dalam menghadapi tahapan *technical review* OECD antara lain meliputi rapat koordinasi dengan OECD Accession Coordinator guna membahas perkembangan dan mekanisme tahapan lanjutabn akses Indonesia ke OECD. Selain itu, dilakukan pula diskusi *technical review* bersama Sekretaris Jenderal OECD sebagai bagian dari penguatan komunikasi teknis dan klarifikasi substansi kebijakan yang relevan dengan instrumen OECD.

Pada tanggal 12 Desember 2025 dilaksanakan kunjungan *Deputy Secretary General* dan Delegasi OECD untuk melaksanakan diskusi pelaksanaan *technical review* akses OECD oleh Sekretariat Tim Nasional OECD yang dihadiri oleh Koordinator Akses OECD serta perwakilan kementerian/lembaga terkait. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, beberapa hal yang menjadi perhatian bersama kementerian/lembaga anggota Tim Nasional OECD, antara lain:

- OECD tidak menentukan tenggat waktu dalam penyelesaian proses akses suatu negara. Kecepatan penyelesaian proses akses suatu negara dikembalikan kepada negara akses dalam menyediakan informasi dan menindaklanjuti rekomendasi kebijakan yang diperlukan dalam menjembatani *policy gaps* sebagaimana rekomendasi yang akan dihasilkan dalam proses *technical review*.
- Proses *technical review* dilakukan secara terdesentralisasi dan menyesuaikan substansi serta kebijakan dari masing-masing direktorat/komite OECD.

- Kementerian/lembaga penanggung jawab bidang dapat berkoordinasi dengan OECD dan anggota bidang dalam pelaksanaan *technical review*. Hal ini terutama agar terdapat sinergi proses koordinasi di tingkat nasional dengan agenda pertemuan tingkat komite OECD yang telah terjadwal setiap tahun.
- Sekretariat OECD sedang berkoordinasi dengan direktorat/komite OECD terkait penyusunan *timeline technical review* yang akan disampaikan kepada kementerian/lembaga penanggungjawab bidang.
- Proses *technical review* pada beberapa bidang akan dilakukan oleh Sekretariat OECD dengan tahapan dan *timeline* yang berbeda dari bidang lain, yaitu pertumbuhan inklusif, kepatutan, transportasi laut, bantuan pembangunan, pembangunan ekonomi, pariwisata, tenaga nuklir, dan perdagangan pada sektor UMKM.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi yang telah tercapai per Triwulan IV adalah sebagai berikut:

1.1 Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Tindak Lanjut Proses Akses OECD Pasca Penyampaian Dokumen Initial Memorandum dan Persiapan Technical Review	Terlaksana	Setelah penyampaian Dokumen Initial Memorandum, proses akses masuk pada tahapan <i>technical review</i> . Tahap ini dimulai dengan distribusi kuesioner kepada K/L Anggota Tim Nasional OECD yang dilanjutkan dengan kunjungan <i>fact-finding mission</i> ke Indonesia dan penyusunan studi independen untuk memberikan masukan terhadap kebijakan dan regulasi Indonesia yang memerlukan proses <i>finetuning</i> lebih lanjut.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi dengan OECD Accession Coordinator pada tanggal 31 Oktober 2025
2. Rapat tindak lanjut Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Proses Akses Indonesia ke dalam OECD tanggal 5 November 2025.

Pencapaian Sasaran Program 2: Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Nilai Realisasi PMA dan PMDN.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Nilai Realisasi
PMA dan PMDN**

Latar Belakang

Meningkatnya Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor investasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, investasi mencakup Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertumbuhan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi sangat krusial untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, mempercepat hilirisasi sektor unggulan, dan menstimulus pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat dan daerah.

Dengan target nilai realisasi investasi sebesar Rp1.905,60 Triliun pada tahun 2025, pemerintah mengharapkan peningkatan signifikan dalam penanaman modal baik dari investor domestik maupun asing. Sasaran ini juga mencerminkan komitmen untuk menjaga iklim investasi yang kondusif melalui reformasi regulasi, digitalisasi layanan perizinan, dan fasilitasi investasi langsung yang efisien.

Peningkatan investasi diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti industri pengolahan, energi terbarukan, infrastruktur, serta ekonomi hijau dan digital, sehingga investasi tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berdampak secara kualitatif terhadap perekonomian nasional.

PMA merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Nilai Realisasi PMA dan PMDN merupakan turunan dari Prioritas Nasional Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diamanatkan kepada Menko Perekonomian sebagai koordinator dalam meningkatkan investasi yang kemudian diturunkan kepada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Leader dari nilai realisasi PMA dan PMDN tetap berada di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Peran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah melakukan pengawalan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung ketercapaian realisasi Nilai PMA dan PMDN di Bidang Hilirisasi.

Formula pengukuran:

Nilai PMA = Ekuitas Asing + Pinjaman Luar Negeri + Reinvestasi Laba Asing

Nilai PMDN = Ekuitas Domestik + Pinjaman Dalam Negeri + Reinvestasi Laba Domestik

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RPJMN Tahun 2025-2029 serta Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi Jangka Menengah 2025-2029. Adapun target Triwulan IV sebesar 100%.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Nilai Realisasi PMA dan PMDN yang telah terealisasi kumulatif sebesar Rp1.434,3 Triliun atau mencapai 75,2% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun (Rupiah)	Rp 1.905,6 Triliun	Rp1.931,2 Triliun	101,32% (memuaskan)

Berdasarkan laporan resmi dari Kementerian Investasi/BKPM, capaian realisasi investasi pada Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan kinerja positif dengan total realisasi sebesar Rp 491,4 triliun yang artinya secara kumulatif sebesar Rp1.434,3 triliun. Angka ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 212,0 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 279,4 triliun.

Dari sisi wilayah, lima besar lokasi realisasi investasi tercatat berada di:

1. Jawa Barat sebesar Rp 78,7 triliun,
2. DKI Jakarta sebesar Rp 66,8 triliun,
3. Jawa Timur sebesar Rp 40,0 triliun,
4. Banten sebesar Rp 38,6 triliun,
5. Sulawesi Tengah sebesar Rp 29,6 triliun.

Jika dilihat dari subsektor, realisasi investasi Triwulan IV 2025 didorong oleh lima subsektor utama PMA, yaitu:

1. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar USD 3,9 Miliar,
2. Listrik, Gas, dan Air sebesar USD 1,4 Miliar,
3. Industri Kertas dan Percetakan sebesar USD 1,3 Miliar,
4. Industri Kimia dan Farmasi sebesar USD 1,2 Miliar,
5. Pertambangan sebesar USD 1,2 Miliar.

Kemudian untuk lima subsektor pendukung realisasi PMDN meliputi:

1. Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi sebesar Rp 34,6 Triliun,
2. Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran sebesar Rp 23,5 Triliun,
3. Jasa Lainnya sebesar Rp22,6 Triliun,
4. Pertambangan sebesar Rp 22,3 Triliun,
5. Konstruksi sebesar Rp 22,1 Triliun.

Sementara itu, dari sisi negara asal investasi asing, realisasi PMA didominasi oleh a) Singapura sebesar USD 4,8 miliar; b) Hongkong sebesar USD 3,4 miliar; c) RRT (Tiongkok) sebesar USD 2,1 miliar; d) Malaysia sebesar USD 1,7 miliar; dan e) Jepang sebesar USD 0,8 miliar.

Capaian ini memperlihatkan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik bagi investor domestik maupun asing. Pemerintah akan terus mendorong iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, hilirisasi industri, serta peningkatan promosi investasi di sektor strategis dan berkelanjutan, sehingga realisasi investasi ke depan dapat semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi Pemetaan Pengembangan Hilirisasi Komoditas Strategis bersama K/L dan Stakeholder terkait	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Laporan Kinerja Road Map Rumput Laut, rapat Koordinasi Pembahasan Dukungan Pembiayaan dan Investasi untuk Komoditas Rumput Laut, serta Rapat pembahasan Daya Dukung dan Daya Tampung Danau Toba untuk Budidaya Rumput Laut
2.	Penyelesaian Substansi dalam rangka Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal dan perizinan Berusaha	Terlaksana	Telah menyelesaikan harmonisasi dengan Kementerian Hukum serta telah dilaksanakan Rapat Tingkat Eselon I yang membahas mengenai perubahan ketentuan PP No. 28 Tahun 2025 sektor Pertanian, Kesehatan, Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pangan Nasional, Kehutanan, dan Transportasi.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan Rapat Koordinasi Pengembangan Rumput Laut Terintegrasi 2026-2030 yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

2. Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Kelapa melalui *Collaboration of Indonesia and Japan to Develop SAF Feedstock from Non-Standard Coconut and Pongamia Supported by a Closed Loop System (CLS)*.
3. Mengikuti kegiatan *Business Matching* yang berjudul Akselerasi Investasi Kelapa di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara hybrid menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti video conference zoom meeting, menerapkan prinsip at cost pada reimbursement biaya perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja secara bertahap melalui digital. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan prioritas nasional pada TW IV maupun program di TW IV.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target adalah terdapat irisan tugas dan fungsi dari beberapa unit kerja di Kemenko Perekonomian sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan, duplikasi program, serta kurang optimalnya koordinasi lintas unit dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan menurunkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu penyesuaian dan penegasan kembali tugas serta fungsi masing-masing unit kerja melalui harmonisasi struktur, klarifikasi mandat, dan pembagian peran yang lebih terukur. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap unit kerja memiliki tanggung jawab yang jelas, saling melengkapi, serta mendukung koordinasi terpadu dalam perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi. Hal ini akan membuat irisan dapat diminimalisir, efektivitas kerja meningkat, dan sinergi antar unit dapat terbangun secara berkesinambungan.

3

Sasaran Program 3: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh indikator kinerja Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tingkat Efektivitas **Latar Belakang**
Kerja Sama Ekonomi

***Internasional melalui
Jumlah Komitmen, Nilai
Perdagangan dan
Investasi***

Kerja sama ekonomi internasional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama ekonomi yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama ekonomi yang dimaksud mencakup perjanjian kerja sama ekonomi internasional termasuk di sektor perdagangan dan investasi di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi internasional yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama ekonomi dan investasi. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

IKU ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi internasional dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi dengan negara mitra utama yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi.

Adapun efektivitas kerja sama ekonomi internasional ini didukung dengan melalui berbagai kerja sama dengan negara mitra Indonesia dan lembaga, koordinasi dengan K/L terkait, dan memanfaatkan hasil dari kesepakatan dan perjanjian. Komitmen kerja sama ekonomi dilakukan melalui kesepakatan pada forum yang diketuai dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun perundingan yang dilakukan dan/atau disepakati oleh K/L lain di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini juga meliputi kesepakatan hasil pembahasan, perundingan, dan secara khusus dapat berupa persetujuan atau perjanjian dalam bentuk FTA/PTA/CEPA, bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral maupun review dan upgrading perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, dilaksanakan juga tindak lanjut berupa implementasi hasil kesepakatan, perjanjian, dan program atau proyek yang telah disepakati.

IKU ini juga mencerminkan sejauh mana sebuah negara atau organisasi internasional berhasil dalam mencapai tujuan kerjasama ekonomi melalui berbagai kebijakan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Komitmen dalam konteks kerja sama ekonomi internasional dapat melalui bentuk perjanjian, kontrak, atau kesepakatan yang dibuat antara dua negara atau lebih, serta organisasi internasional. Beberapa kebijakan dan tindak lanjut yang mendukung tercapainya jumlah komitmen antara lain berupa kebijakan diplomasi ekonomi yang proaktif, pembentukan atau pembaruan perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau perjanjian investasi internasional (IIAs), serta tindak lanjut komitmen realisasi program atau proyek yang telah disepakati.

Formula pengukuran:

Efektivitas kerja sama ekonomi internasional ini diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen utama dengan pembobotan sebagai berikut:

1. Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Mitra Indonesia (80%)

Komponen ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati antara Indonesia dan negara mitra, yang mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi internasional. Komitmen tersebut diperoleh melalui kesepakatan dalam berbagai forum kerja sama ekonomi, diplomasi ekonomi, business matching, maupun proyek serta bentuk kerja sama lainnya yang difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bersama K/L terkait. Komponen ini dibobotkan sebesar 80% karena pelaksanaan proses kerja sama ekonomi merupakan tugas dan fungsi pokok dari Deputi 2.

Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Internasional dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar 41 Komitmen.

2. Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur nilai ekspor (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Realisasi komponen ini adalah perolehan nilai perdagangan dari Januari - Oktober tahun berjalan. Komponen ini dibobotkan sebesar 10% karena sub komponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk K/L terkait, asosiasi, dan dunia usaha.

Target Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar USD 177,3 Miliar (catatan: Target Nilai Perdagangan periode Jan-Okt 2025 sebesar USD 147,7 Miliar, dihitung secara proporsional)

Perhitungan target berdasarkan Total nilai Rata-rata perdagangan 5 tahun terakhir dengan data diolah berdasarkan data dari website Kementerian Perdagangan.

3. Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur nilai investasi yang terealisasi (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Realisasi dari nilai investasi ini diperoleh dari nilai investasi dari Januari - September tahun berjalan. Komponen ini dibobotkan sebesar 10% karena sub komponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, K/L terkait, asosiasi, dan dunia usaha.

Target Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar USD 32,29 Milyar (Target Nilai Investasi periode Jan-Sep 2025 sebesar USD 24,22 Milyar)

Sehingga realisasi IKU Efektivitas kerja sama ekonomi internasional diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian 3 komponen diatas.

$$\text{Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional} = 80\% \times \frac{(\text{Realisasi } \sum \text{Komitmen KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})}{(\text{Target } \sum \text{Komitmen KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})} + 10\% \times \frac{(\text{Realisasi } \sum \text{Nilai Perdagangan KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})}{(\text{Target } \sum \text{Nilai Perdagangan KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})} + 10\% \times \frac{(\text{Realisasi } \sum \text{Nilai Investasi KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})}{(\text{Target } \sum \text{Nilai Investasi KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif serta pada dokumen Perencanaan Kinerja Deputy Tahun 2025. Adapun target Triwulan IV sebesar 82%.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Nilai Realisasi Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 72,3% atau mencapai 88,1% dari target Tahun 2025 sebesar 82% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi	Persen	82%	94,32%	105,02%

Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi terdiri jumlah komitmen kerja sama ekonomi internasional dengan negara mitra Indonesia dengan bobot sebesar 80%, nilai perdagangan dengan negara mitra Indonesia dengan bobot sebesar 10%, dan nilai investasi dengan negara mitra Indonesia dengan bobot sebesar 10%.

Jumlah Komitmen

Hingga Triwulan IV, jumlah kumulatif komitmen yang telah terealisasi sebanyak 32 komitmen sebagai berikut:

A. Kerja Sama Ekonomi Bilateral:

1. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam
2. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang
3. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-AS
4. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-China terkait kerja sama Pengembangan Twin Cities
5. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-China dalam rangka pengembangan Supply Chain
6. Komitmen Kerja Sama Indonesia-Australia
7. Komitmen Kerja Sama Indonesia-Prancis
8. Komitmen Penyelesaian Substansial Perundingan Indonesia-EU CEPA
9. Komitmen Penyelesaian Substansi Perundingan Indonesia-EAEU FTA
10. Komitmen pada Forum Senior Officials Meeting Indonesia-Singapore dan Ministerial Meeting Indonesia-Singapura
11. Komitmen pada Forum PPDT 1.5 Indonesia-Jepang
12. Komitmen pada Forum Ministerial Meeting JCEC Indonesia-Korea diganti menjadi "Komitmen pada Pertemuan Co-chairs SKP RI-Belarus"
13. Komitmen pada Forum WGTII RI-Rusia ke-6
14. Komitmen pada Forum SKB RI-Rusia ke-13

15. Komitmen pada Forum Board Meeting Prospera
16. Komitmen pada Forum Joint Indonesia-Germany Economic and Investment Committee (JEIC) diganti menjadi “Komitmen pada Kerja Sama RI-Inggris dalam Kerangka Economic Growth Partnership”
17. Komitmen pada Forum Pertemuan Senior Economic Officials Meeting (SEOM) RI-Australia
18. Komitmen Implementasi dari Kesepakatan IK-CEPA
19. Komitmen Implementasi Kesepakatan IPEF
20. Komitmen Implementasi Implementasi MoU on Cybersecurity Indonesia-Australia

B. Kerja Sama Ekonomi Regional:

1. Rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN Hasil Pertemuan HLTF_EI ke 47 dan 48
2. Rekomendasi Capaian Implementasi MEA 2025 kepada Presiden Hasil Pertemuan AEC Council ke-25 dan ke-26
3. Joint Statement Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA
4. Joint Statement BIMP-EAGA Summit
5. Joint Statement Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT
6. Joint Statement IMT-GT Summit
7. Rekomendasi hasil pertemuan APEC Economic Committee ke-1 dan ke-2 tahun 2025
8. Ministerial Meeting Joint Statemnet APEC SRMM

C. Kerja Sama Ekonomi Multilateral:

1. Pertemuan Sherpa ke-1 Presidensi G20 Afrika Selatan
2. Pertemuan Sherpa ke-2 Presidensi G20 Afrika Selatan
3. Pertemuan Sherpa ke-3 Presidensi G20 Afrika Selatan
4. Pertemuan Sherpa ke-4 Presidensi G20 Afrika Selatan
5. KTT G20 Presidensi Afrika Selatan

Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia

Komponen ini mengukur nilai ekspor (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Negara Mitra Indonesia yang dimaksud antara lain Australia, Republik Perancis, Republik Federal Jerman, Federasi Rusia, Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia, Republik India, Republik Sosialis Vietnam, Jepang, Persatuan Emirat Arab, Amerika Serikat, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Singapura, Republik Korea.

Realisasi dari nilai perdagangan bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh di suatu tahun dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi sub komponen ini adalah perolehan nilai perdagangan dari Januari - Oktober tahun berjalan.

Komponen ini di bobotkan sebesar 10% karena subkomponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, asosiasi, dan dunia usaha. Nilai perdagangan adalah indikator penting keberhasilan kerja sama ekonomi, namun dipengaruhi banyak faktor eksternal seperti dinamika pasar global, tarif, nontarif barrier, dan kondisi mitra dagang. Peran Kemenko Perekonomian lebih pada fungsi

fasilitasi dan koordinasi kebijakan sehingga termasuk komponen yang tidak dapat dikendalikan secara langsung.

Target Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 diproyeksikan sebesar USD 177.3 Milyar (dengan catatan Target Nilai Perdagangan periode Jan-Okt 2025 diproyeksikan sebesar USD 147,7 Milyar, dihitung secara proporsional).

Perhitungan target berdasarkan total nilai rata-rata perdagangan 5 tahun terakhir dengan data diolah berdasarkan data dari website Kementerian Perdagangan.

Nilai Investasi dengan Negara Mitra

Komponen ini mengukur nilai investasi yang terealisasi (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Negara Mitra Indonesia yang dimaksud antara lain Australia, Republik Perancis, Republik Federal Jerman, Federasi Rusia, Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia, Republik India, Republik Sosialis Vietnam, Jepang, Persatuan Emirat Arab, Amerika Serikat, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Singapura, Republik Korea.

Realisasi nilai investasi bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh di suatu tahun dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi dari nilai investasi ini diperoleh dari nilai investasi dari Januari - September tahun berjalan.

Komponen ini di bobotkan sebesar 10% karena subkomponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, asosiasi, dan dunia usaha. Seperti perdagangan, nilai investasi juga sangat bergantung pada keputusan sektor swasta dan faktor eksternal seperti iklim usaha, regulasi, dan insentif. Kemenko Perekonomian memiliki peran dalam memperkuat iklim investasi melalui rekomendasi kebijakan, promosi dalam forum bilateral, atau mengawal isu investor, melakukan peninjauan kerja sama dengan negara mitra namun tidak secara langsung menarik investasi.

Target Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 diproyeksikan sebesar USD 32,29 Milyar (Target Nilai Investasi periode Jan-Sep 2025 diproyeksikan sebesar USD 24,22 Milyar)

Perhitungan target berdasarkan Total nilai Rata-rata investasi dengan negara mitra utama Indonesia 5 tahun terakhir dengan data diolah berdasarkan data dari website BKPM/Kementerian Investasi. Sehingga realisasi IKU 1.1 diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian 3 komponen diatas.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan

1.	Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Australia dalam Kerangka SEOM	Terlaksana	Telah dilaksanakan pertemuan ke-4 Senior Economic Official's Meeting (SEOM) RI-Australia pada tanggal 8 Desember 2025 yang merupakan tindak lanjut dari mandat Annual Leaders Meeting (ALM) 2020 dan CSDP 2025-2029 serta membahas perkembangan ekonomi global, dinamika perdagangan, penguatan resiliensi ekonomi, kerja sama multilateral, dan regional, serta meninjau kemajuan General Review IA-CEPA dan persiapan deliverables menuju ALM 2026.
2.	Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Indonesia melalui Rekomendasi kebijakan dalam rangka implemenyaso komitmen IPEF	Terlaksana	Telah dilaksanakan rangkaian pertemuan dalam rangka implementasi Komitmen IPEF khususnya dalam kerangka IPEF Pilar II, yakni melalui: a. Pertemuan Chief Negotiators IPEF pada tanggal 28 November 2025 b. Pertemuan IPEF LRAB Subcommittee and Board Meetings tanggal 2 Desember 2025
3	Menghadiri Pertemuan AEC Council ke-26	Terlaksana	Pertemuan AEC Council ke-26 telah dilaksanakan pada 24 Oktober 025 di Kuala Lumpur, Malaysia
4	Menghadiri KTT ASEAN	Terlaksana	Rangkaian KTT ASEAN ke-47 dan KTT terkait lainnya telah dilaksanakan pada tanggal 26-28 Oktober 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia

5	Menghadiri pertemuan tingkat menteri BIMP-EAGA	Terlaksana	Pertemuan tingkat menteri BIMP-EAGA ke-28 telah dilaksanakan pada 13-14 November di Davao, Filipina dengan dihadiri Konsulat Jenderal RI untuk Davao City sebagai ketua delegasi pada pertemuan
6	Menghadiri pertemuan tingkat menteri APEC SRMM	Terlaksana	Pertemuan tingkat menteri reformasi struktural APEC (APEC Structural Reform Ministerial Meeting/SRMM) ke-4 telah diselenggarakan tanggal 22-33 Oktober 2025 di Korea. Delegasi Indonesia diketuai oleh Wakil Menteri Perdagangan mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
7	Pertemuan Sherpa Ke-4 G20	Terlaksana	Sherpa G20 ke-4 telah dilaksanakan pada tanggal 1619 November 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan. Pertemuan ini membahas <i>draft Johannesburg Leaders' Declaration</i>
8	Komitmen pada Leaders' Declaration G20 Presidensi Afrika Selatan	Terlaksana	G20 South Africa Summit: Leaders' Declaration telah tercapai pada KTT G20 yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 November 2025. Konsesnsus tersebut memuat komitmen yang menegaskan dukungan G20 kepada negara berkembang khususnya Afrika.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perundingan Ketiga Perdagangan Resiprokal RI-AS (**12 – 17 Oktober 2025**)
2. Perundingan Keempat Perdagangan Resiprokal RI-AS (**17-22 Desember 2025**)
3. Pertemuan Bapak Menko dengan Wakil Presiden Konfederasi Swiss sekaligus Federal Councilor Guy Parmelin pada tanggal **1 Oktober 2025** dalam rangka membahas tindak lanjut implementasi Indonesia-EFTA CEPA

4. Menghadiri Strategic Trade Management Week Filipina (STM) pada tanggal **12-13 November 2025**.
5. Penandatanganan Perjanjian Indonesia-EAEU FTA pada tanggal 22 Desember 2025.
6. Pertemuan Menko Perekonomian dengan Ketua Dewan Maritim Rusia tanggal 7 November 2025.
7. Menghadiri Rapat Pleno Sekretariat Nasional ASEAN (2 Oktober 2025)
8. 13th BIMP-EAGA Environment Cluster Meeting pada 6-7 Oktober 2025.
9. Menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Logistik KTT APEC pada 7 Oktober 2025.
10. Menghadiri Rapat Penyusunan Bahan Substansi Intervensi Presiden RI pada Rangkaian APEC Economics Leaders Meeting/KTT APEC pada 9 Oktober 2025.
11. Prep-SOM for BIMP-EAGA Ministerial Meeting pada 21 Oktober 2025.
12. BIMP-EAGA Working Level Meeting pada 29 Oktober 2025.
13. Menjadi Delegasi RI pada Rangkaian KTT APEC pada 31 Oktober – 1 November 2025.
14. Rapat Jaring Masukan dan Tindak Lanjut Implementasi Hasil KTT ASEAN ke-47 pada 3 Desember 2025.
15. BIMP-EAGA-ROK Working Level Meeting pada 11 Desember 2025.
16. Rapat Tindak Lanjut Pertemuan APEC 2025 terkait Isu Perdagangan pada 11 Desember 2025.
17. Pertemuan Bilateral dengan Sherpa Singapura pada tanggal 3 Oktober 2025.
18. Pertemuan dengan Bilateral Sherpa EU pada tanggal 30 Oktober 2025
19. Pertemuan Bilateral dengan Sherpa Kanada pada tanggal 7 Oktober 2025
20. Pertemuan dengan Sous Sherpa IsDB pada tanggal 26 November 2025.

4

Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Indeks Efektivitas

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang

terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah:

1. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang meliputi:
 - a. Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA maupun Kesepakatan Bilateral
 - b. Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
 - c. Implementasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
2. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang meliputi:
 - d. Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA
 - e. Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Regional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
 - f. Implementasi Kerja Sama Ekonomi Regional di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
4. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang meliputi:
 - a. Rekomendasi kebijakan proses penyusunan Initial Memorandum yang mencakup penyusunan narasi posisi Indonesia atas instrumen OECD, harmonisasi substansi pada komite, dan tindak lanjut hasil reviu Sekretariat Tim Nasional OECD
 - b. Rekomendasi kebijakan yang mencakup perumusan posisi Indonesia dalam isu-isu strategis global, konsolidasi substansi lintas K/L, dan tindak lanjut atas hasil pertemuan pada forum Sherpa Track G20.
5. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Investasi dan Hilirisasi yang meliputi rekomendasi kebijakan kemudahan berinvestasi dan akselerasi hilirisasi.
6. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang meliputi:
 - a. Pelaporan secara berkala terkait Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED)
 - b. Perkembangan ekonomi global dan domestik
 - c. Prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator internal bussiness yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi). Adapun

penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputy dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputy dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektifitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputy dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks efektifitas SKP} = \sqrt[5]{SKP_{AD1} \times SKP_{AD2} \times SKP_{AD3} \times SKP_{AD4} \times SKP_{AD5}}$$

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100

Efektif (3), rentang nilai 81 - 90

Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80

Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 82% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	100% (memusaskan)

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Indeks efektivitas meliputi penyelesaian komitmen, partisipasi dalam forum, dan implementasi kebijakan kerja sama ekonomi dengan negara mitra Indonesia. Tiga tahap proses yang telah tercapai sebagai berikut identifikasi isu kerja sama ekonomi, koordinasi dan sinkronisasi lintas K/L dan pelaku usaha, serta formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di masing-masing unit kerja eselon II

5

Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Sasaran program ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang mencakup: (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori

penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{(Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep + Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep + Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep + Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep + Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep)}{5}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target Triwulan IV sebesar 100%.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 3 dari 4 atau mencapai 100% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	100% (memuaskan)

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan dan pelaporan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyampaian form survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dari

	bidang kerja sama ekonomi dan investasi		masing-masing unit kerja eselon II kepada K/L terkait
--	---	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja seperti pelaksanaan reminder secara berkala kepada seluruh pegawai untuk berpartisipasi dalam kegiatan survei.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya perjalanan dinas yang dibayarkan at cost, rapat dilaksanakan secara online/daring melalui media zoom meeting, mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan naskah dinas melalui penggunaan SRIKANDI, memanfaatkan kembali kertas yang tidak terpakai seperti untuk penempelan bukti dukung perjalanan dinas,

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, belum terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025 terlaksana dengan baik dan diharapkan pada triwulan selanjutnya target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

6

Sasaran Program 6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Persentase

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target Triwulan IV sebesar 85%.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 117,64% dari target Tahun 2025 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persen	85%	100%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Kompilasi Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV	Terlaksana	Telah dilaksanakan laporan kompinalsi kinerja tahun 2025
2.	Fasilitasi Evaluasi SAKIP Eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan fasilitasi evaluasi SAKIP Eselon I
3.	Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan draft awal kinerja Perjanjian Kinerja 2026
4.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilaksanakan oprimalisasi pemanfaatn SRIKANDI untuk pemrosesan surat dan disposisi secara rutin selama Triwulan IV

5.	Monev Realisasi Anggaran Triwulan IV	Terlaksana	Telah dilaksanakan secara rutin pengisian laporan capaian anggaran melalui e-Monev pada setiap awal bulan pada tanggal 1 pada bulan berikutnya
6.	Implementasi LLAT	Terlaksana	Telah dilaksanakan implementasi LLAT
7.	Penyusunan RPD Triwulan IV	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan matriks RPD triwulan IV
8.	Penyusunan Hasil Tindaklanjut Laporan Hasil Pemanfaatan SP4N-LAPOR!	Terlaksana	Telah dilaksanakan bahwa tidak ada laporan masuk
9.	Pengisian SIRUP	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengisian SIRUP
10.	Monev Pencatatan SIRUP	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengisian SIRUP
11.	Penyusunan Usulan Formasi ASN	Terlaksana	Telah dilaksanakan pendataan dan penyusunan usulan pegawai tenaga pendukung melalui Nota Dinas No. OT/241.D.II.EKON.1/10/2025
12.	Penyusunan Bahan LOM	Terlaksana dengan perubahan	Belum ada penyusunan bahan LOM karena tidak ada pelaksanaan LOM hingga triwulan IV dan diubah menjadi pelaksanaann Rapat Pimpinan pada 5 November 2025
13.	Koordinasi Hasil Rekomendasi BPK	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi bahwa tidak ada temuan terkait pemeriksaan BPK
14.	Sosialisasi Pengisian SPI	Terlaksana	Telah dilaksanakan sosialisasi pengisian SPI
15.	Dukungan Publikasi Konten dan Penggunaan Logo BerAHKLAK	Terlaksana	Telah digunakan pada bahan paparan dan publikasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Menghadiri Rapat Koordinasi Mekanisme LLAT dalam rangka pembahasan pedoman teknis Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) terkait mekanisme pembayaran kegiatan yang dibebankan pada APBN tanggal 7 Oktober 2025.

1. Melaksanakan penyusunan tanggapan atas hasil sementara Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor AK/231/D.II.M.EKON.1/10/2025 tanggal 24 Oktober 2025.
2. Melaksanakan koordinasi dalam pengisian sistem monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Tematik Triwulan I s.d. III Tahun 2025 yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor OT.05/232/D.II.M.EKON.1/10/2025 tanggal 24 Oktober 2025.
3. Melaksanakan koordinasi dan penyampaian data pegawai sebagai User SP4N-LAPOR! yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor PW.06.08/243/D.II.M.EKON.1/10/2025 tanggal 31 Oktober 2025.
4. Melaksanakan koordinasi usulan kegiatan Tim Pelaksana Agen Perubahan dan penyampaian konsep Surat Edaran Deputi untuk dukungan implementasi program Agen Perubahan Tahun 2025-2026 melalui Nota Dinas Nomor KSI.01.02/263/D.II.M.EKON.1/11/2025 tanggal 26 November 2025.
5. Melaksanakan koordinasi dalam pengisian sistem monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik Triwulan IV Tahun 2025 yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor OT.05/286/D.II.M.EKON.1/12/2025 tanggal 22 Desember 2025.
6. Melaksanakan koordinasi dan telaah atas uraian tugas kebutuhan Pegawai Non-ASN melalui Nota Dinas Nomor KP.14/294/D.II.M.EKON.1/12/2025 tanggal 30 Desember 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya perjalanan dinas yang dibayarkan at cost, rapat dilaksanakan secara daring melalui media zoom meeting, mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan naskah dinas yang telah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan SRIKANDI, dan memanfaatkan kembali kertas yang tidak terpakai seperti untuk penempelan bukti dukung perjalanan dinas, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 445.993.000. Proyeksi efisiensi tersebut sejalan dengan instruksi Presiden melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi adalah tidak terlaksananya rencana aksi penyusunan bahan LOM karena tidak terdapat penyelenggaraan kegiatan LOM di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rencana aksi tersebut diubah menjadi penyelenggaraan Rapat Pimpinan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya atau rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu koordinasi dengan Sekretariat terkait dengan rencana penyelenggaraan LOM dan target penyusunan

bahan LOM agar dapat disesuaikan dengan rencana aksi Sekretariat Deputy pada tahun 2026.

Jakarta, 14 Januari 2026
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi



Edi Prio Pambudi